

PEREMPUAN DI RANAH POLITIK: ANCAMAN ATAU PELUANG?

Dzunuwanus Ghulam Manar

Perempuan berpolitik?

Tanyakan itu kepada setiap warga Negara Indonesia, sudah pasti mayoritas jawabannya adalah kontra; yang kurang kerjaan lah, tidak *pantes*, bukan takdirnya, bukan porsinya, atau juga dikira mau berlagak *maskulin*. Apakah kemudian politik adalah porsi, takdir dan hak laki-laki? Bisa jadi iya, melihat kepada fakta dari tulisan Khofifah Indar Parawansa (2002), bahwa keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia hanya berkisar 10 % saja sejak digelar pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan data tahun 2004¹. Prestasi tertinggi diperoleh dari Pemilu 1987 yang menempatkan 65 orang perempuan dari 500 anggota DPR (13 %), sedangkan Pemilu 1999 yang cukup terbuka, transparan dan demokratis hanya mengantarkan 45 orang perempuan saja ke kursi parlemen (9 %). Fakta ini bisa jadi mencerminkan keadaan perempuan Indonesia di ranah politik yang masih saja terpinggirkan perannya. Fakta secara nasional ini bisa mengarah kepada generalisasi bahwa perempuan di Indonesia dianggap tidak begitu penting dan strategis untuk memasuki ranah politik.

Apakah asumsi-asumsi di atas tersebut benar dan relevan dengan keadaan kini? Paparan berikut akan menyampaikan argumen-argumen aktifitas perempuan pada ranah politik serta dampaknya bagi sebuah masyarakat bangsa.

Yunani yang memiliki filosof dan perintis dalam ilmu politik tidak dapat menjelaskan mengapa hanya laki-laki yang boleh berperan dalam pengambilan keputusan dalam *polis*, sementara perempuan dan budak diabaikan haknya, meski sama-sama sebagai warga negara. Struktur sosial yang menempatkan laki-laki lebih berhak bertindak dalam politik seperti di atas berasal dari budaya patriarki yang secara turun-temurun terlestarikan dari budaya kerajaan kuno yang

¹ Data ini diambil dari tulisan Khofifah Indar Parawansa, *Obstacles to Women's Participation in Indonesia* yang dimuat di IDEA International 2002 terjemahan Bahasa Inggris dari judul Bahasa Indonesia *Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*. www.idea.int diakses pada 6 Oktober 2009 jam 20.32 WIB.

menganggap laki-laki sebagai manifestasi dari *okol*/kekuatan sebagai cerminan keunggulan satu orang atas orang lain. Oleh karena dapat dipahami bahwa laki-laki yang kuat, pandai bertarung, mahir memanah dan bermain pedang akan mendapatkan keistimewaan atau jabatan yang terhormat yang notabene memiliki pengaruh dalam menentukan sesuatu/mengambil keputusan. Sungguh pun perempuan memiliki kapasitas yang sama, tetap saja ia tidak berhak ikut berperang dan menduduki posisi-posisi strategis dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya sampai dengan saat ini, masih saja ada masyarakat yang mengikuti pola pemikiran seperti di atas. Perempuan masih diperlakukan sebagai warga negara kelas dua, dibatasi haknya dalam ikut serta mengambil keputusan kolektif serta steril dari posisi-posisi strategis dalam masyarakat. Ketika politik dimaknai sebagai kegiatan pengambilan keputusan di ruang publik yang berdampak kepada masyarakat secara keseluruhan, maka asumsi yang menyatakan perempuan tidak boleh turut serta di dalamnya adalah asumsi yang sudah tidak lagi relevan². Dalam kerangka ini, laki-laki dan perempuan sebagai warga negara haruslah dipandang sebagai entitas yang setara (*equal*) karena apapun yang diputuskan di ranah politik akan berdampak kepada semuanya, baik laki-laki maupun perempuan.

Sebuah survey yang dilakukan oleh *National Democratic Institute* (NDI) menyatakan bahwa negara-negara yang memperlakukan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan memiliki keunggulan-keunggulan antara lain; standar hidup yang tinggi/lebih baik dan angka korupsi yang cenderung lebih rendah; keterlibatan perempuan dalam semua level, baik lokal, regional maupun nasional memiliki dampak positif pada kehidupan sosial ekonomi warganya, keluarga-keluarga serta kelompok-kelompok yang kurang beruntung; dalam masa rekonsiliasi dan rekonstruksi pasca perang atau bencana, pelibatan perempuan mempercepat proses-proses yang dilakukan³. Hal tersebut dapat dicapai karena

² Seperti yang dinyatakan oleh Joyce Mitchell, bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya, atau juga Karl W. Deutsch yang menyatakan bahwa politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum, selengkapnya lihat Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008: hal 19-20.

³ www.ndi.org diakses pada 6 Oktober 2009 jam 20.05 WIB.

adanya semacam pemahaman yang komprehensif yang didapat dari adanya sinergi antara persepsi, formulasi dan implementasi antara laki-laki dan perempuan. Jika selama ini setiap keputusan berasal dari isi kepala para laki-laki, maka dengan terbukanya kesempatan perempuan berperan dalam pengambilan keputusan maka yang muncul adalah *counterpart* ide, gagasan dan solusi dari pihak perempuan. Bisa jadi hal tersebut menjadi saling melengkapi dengan hal-hal yang telah ada atau malah menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada karena perbedaan persepsi, emosi dan psikologi antara laki-laki dan perempuan. Dapat dinyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan di ruang publik/ranah politik justru memperkaya dan memperlengkap wacana dan pendekatan dalam mengambil keputusan.

Keberadaan bahkan keberhasilan perempuan di ranah politik sudah dibuktikan oleh sejarah. Beberapa negara maju, seperti di Jerman misalnya, kepala pemerintahan/*kanselir* dijabat oleh seorang perempuan, Angela Merkel. Margareth Thatcher di Inggris, Helen Clarke di Selandia Baru, Tarja Helonen di Finlandia, Sirleaf Johnson di Liberia, Aquino & Arroyo di Filipina, Hasina & Zia di Bangladesh dan masih banyak lagi perempuan yang menduduki jabatan politik strategis di seluruh dunia adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dan memimpin di ranah politik. Para perempuan itu mampu mendobrak tradisi patriarki di negaranya masing-masing, bahkan memberikan kontribusi atas aktualisasinya; bahwa mereka juga ikut menentukan proses politik yang terjadi.

Bagaimana dengan Indonesia?

Dari penelitian Farida Nurland (2002), paling tidak ada 3 hal yang menjadi kendala peran perempuan pada ranah politik di Indonesia⁴. *Pertama*, faktor budaya Indonesia yang feodal dan patriarki yang mengungkung perempuan untuk beraktualisasi pada ranah-ranah domestik. Secara tradisi, perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan yakni hanya berpusat pada aktifitas rumah tangga. Bahkan ada semacam jargon orang tua yang enggan untuk

⁴ Fransisia SSE Seda, *Women and Politics in Indonesia: A General Overview of Strengthening Women's Political Participation* www.wdn.org diakses pada 6 Oktober 2009 jam 20.18 WIB.

menyekolahkan anak perempuannya karena paling nanti hanya akan diambil istri dan mengurus rumah tangga saja Hal semacam ini terus-menerus diturunkan pada setiap generasi sehingga menjadi sebuah nilai yang berlaku dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan perempuan. *Kedua*, adanya pemahaman masyarakat yang konservatif atas tafsir ajaran agama. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dalil atau hukum agama yang memberikan keistimewaan kepada pihak laki-laki. Sungguh pun bahwa dalil dan hukum tersebut sifatnya adalah tafsir, namun proses sosialisasi yang terus-menerus dapat menjadikan hal tersebut sebagai sebuah dogma/hukum yang tak terbantahkan. Padahal jika dikaji secara lebih mendalam maka agama pun sebenarnya memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan, bahkan mereka dianjurkan untuk saling bekerja sama. *Ketiga*, munculnya hegemoni negara yang masih sangat besar terhadap warga negara yang terlihat dari dukungan atas budaya patriarki dalam segala aspek. Hal ini seperti yang ditentang oleh banyak aktivis perempuan mengenai Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi yang masih menjadikan tubuh perempuan sebagai obyek dan diskriminatif. Perempuan dianggap sebagai pihak yang paling bersalah atas munculnya kejahatan susila⁵. Dengan demikian, dari kaca mata ini perempuanlah yang harus membatasi dirinya dan memperlakukan dirinya secara sopan dan terhormat. Bagi aktivis perempuan hal ini dianggap tidak adil karena negara tidak juga memperlakukan hal yang sama kepada laki-laki. Dengan kata lain, negara masih saja menerapkan diskriminasi susila kepada perempuan dengan mengatur secara mendetail apa-apa yang patut dan boleh dilakukan oleh perempuan.

Tulisan di awal mengenai keterwakilan perempuan di parlemen serta hasil penelitian mengenai hambatan atas peran perempuan pada ranah politik di Indonesia merupakan gambaran bahwa laki-laki di Indonesia masih belum mau memberikan tempat yang layak kepada perempuan, khususnya dalam ranah politik yakni dalam upaya mengambil keputusan bersama. Bisa jadi laki-laki yang merasa diuntungkan dengan hal ini akan mempertahankan *status quo* dan berdalil bahwa bukan tempatnya perempuan aktif secara politik. Pandangan ini

⁵ Henny Irawati, *Perempuan (masih) di Kerajaan Mimpi*, Jurnal Perempuan 7 Maret 2007.

merepresentasikan bahwa perempuan adalah ancaman atas posisi, gengsi dan martabat laki-laki. Masuk/bergabungnya perempuan justru akan mengurangi keistimewaan yang selama ini dinikmati, bahkan bisa jadi ancaman apabila nanti dapat menggantikan peran yang selama ini disandang. Sehingga laki-laki dalam kelompok ini sangat khawatir akan sepak terjang perempuan yang dapat mengurangi bahkan menggantikan posisinya yang sudah sangat mapan.

Sesungguhnya, manakala muncul kemauan untuk berkompromi dan bekerjasama, akan banyak hal-hal yang bisa diraih dan dicapai oleh laki-laki dan perempuan Indonesia. Hal ini bisa direfleksikan dari fakta-fakta yang muncul diberbagai negara di dunia, bahwa dalam politik laki-laki dan perempuan bisa bersatu dan saling berbagi tempat dalam mewujudkan kebaikan bagi masyarakatnya. Masalah yang ada sekarang di Indonesia sebenarnya sampai sejauhmana kerelaan laki-laki menerima peran wanita di ranah politik? Apabila perempuan dipandang sebagai ancaman atas keamanan, yang terjadi adalah konflik yang terus berkepanjangan karena terjadi pemasangan hak dalam mengambil keputusan bersama. Namun sebaliknya, jika keterlibatan perempuan dipandang sebagai peluang untuk sebuah kemajuan; mengisi ruang kosong, menjadi *counterpart*, bahkan inisiator, maka ranah politik akan marak dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan dan membawa kebaikan bersama karena tidak ada kelompok yang ditinggalkan.

Dimuat di Majalah OPINI, media kreatif dan sikap kritis mahasiswa, Majalah Mahasiswa FISIP Universitas Diponegoro Edisi 36//2010 Rubrik Telaah Jurusan hal 9-12. ISSN : 012-7913 Januari 2010.